

No. Reg.

PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF

Bantuan Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional
(BPMPT-PTPG)



**PENGEMBANGAN MODEL PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN
BAGI PESERTA PPG PTKIN SE-JAWA TENGAH**

Disusun Oleh:

Ketua Tim: Dr. H. Giyoto, M.Hum. (IAIN Surakarta)
Anggota: 1. Dr. Toto Suharto, M.Ag. (IAIN Surakarta)
2. Ika Sulistyarini, M.Pd. (IAIN Surakarta)

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2018**

PENGEMBANGAN MODEL PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN BAGI PESERTA PPG PTKIN SE-JAWA TENGAH

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan guru dan berbagai kelengkapan pendukungnya bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.¹ Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia telah lama menerapkan konsep pendidikan, baik bagi guru maupun non guru, yang di antaranya menerapkan sistem asrama dalam bentuk pondok pesantren, baik yang bertipe tradisional ataupun modern.² Pondok pesantren yang menurut Nurcholis Madjid memiliki watak *indigenous* Islam Indonesia,³ dalam konteks ini, dapat dikatakan sebagai cikal-bakal bagi keberadaan pendidikan berasrama di Indonesia, yang secara historis dibuktikan dengan berdirinya Pesantren Tegalsari di Panaraga pada 1742 M.⁴ Perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan pesantren ini menyelenggarakan pendidikan persekolahan secara formal yang dikenal dengan konsep “Madrasah dalam Pesantren” dengan perintisnya adalah Pesantren Tebuireng di Jombang.⁵ Pada saat yang berbeda, lembaga-lembaga sekolah formal juga sudah mulai menerapkan sistem asrama bagi peserta didiknya. Sekolah/madrasah yang dikelola oleh Muhammadiyah misalnya, saat ini sudah mulai menerapkan sistem asrama yang disebut

¹Untuk konteks pendidikan Islam, Mahmud Yunus mencatat bahwa pendidikan guru di Indonesia secara resmi berdiri semenjak pendirian Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) tahun 1950, yang kemudian berubah menjadi Pendidikan Guru Agama Islam berdasarkan Ketetapan Menteri Agama tanggal 15 Pebruari 1951. Baca Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 360-361.

²Statistik pendidikan Islam yang dibuat Kementerian Agama tahun 2016 menyebutkan dua kategori pesantren, yaitu pesantren tradisional (pesantren yang hanya menyelenggarakan kajian kitab); dan pesantren modern (pesantren yang selain menyelenggarakan kajian kitab, juga menyelenggarakan layanan pendidikan lainnya). Lihat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015* (Jakarta: Dirjen Pendis, 2016), hlm. 179.

³Nurcholish Madjid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Cet. I; Jakarta: P3M, 1985), hlm. 3. Tulisan ini dimuat ulang dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3-18.

⁴Lihat Hanun Asrohah, *Pelembagaan Pesantren: Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Cet. I; Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), hal. xvi.

⁵Tentang sejarah pembentukan lembaga madrasah di pesantren, lihat misalnya Toto Suharto, “Bayn ma‘had Tebuireng wa Madrasat Manba‘ al-‘Ulūm: Dirāsah tārīkhiyyah ‘an nash’at mafhūm ‘Al-Madrasah fi al-Ma‘had’”, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 149-173.

MBS (Muhammadiyah Boarding School). Demikian juga sekolah/madrasah yang dikelola oleh Persatuan Islam menyebut nama lembaga pendidikannya dengan istilah Pesantren Persatuan Islam.⁶ Bahkan dalam perkembangan akhir-akhir ini, banyak bermunculan sekolah berasrama (*boarding school*) untuk sekolah Islam unggulan. Penelitian Halfian Lubis menyimpulkan bahwa beberapa sekolah Islam unggulan di Indonesia, seperti SMA Islam Al-Azhar Jakarta, SMA Plus Muthahhari Bandung, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA Unggul Darul Ulum Jombang, SMA Plus Al-Azhar Medan, SMA Islam Athirah Makassar, dan SMA Islam Dwiwarna Bogor, semua sekolah Islam unggulan ini memiliki fasilitas memadai, di antaranya adalah asrama bagi para pelajar.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kualitas pendidikan, keberadaan asrama bagi pelajar merupakan hal yang penting bagi penunjang proses pembelajaran.

Sistem pendidikan berasrama di atas didasarkan pada kehendak untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih utuh, yang mencakup cipta, rasa, dan karsa; sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dalam berpikir dan berkepribadian mulia. Pemikiran tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa pada umumnya sekolah non-asrama terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan kognitif, sehingga banyak aspek lain dari kehidupan peserta didik yang belum tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada dalam penyelenggaraan program pendidikan pada sekolah-sekolah non-asrama. Dalam konteks ini, A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama masa Orde Baru, menyebutkan bahwa “sistem pengajaran dan pendidikan agama yang paling baik di Indonesia adalah sistem pengajaran *ala* madrasah dan sistem pendidikan *ala* pesantren. Jelasnya: *madrasah dalam pesantren* adalah sistem pengajaran dan pendidikan agama yang paling baik”,⁸ demikian tulis Mukti Ali. Dengan memadukan dua sistem pendidikan; yaitu antara sistem formal (madrasah/sekolah) dengan sistem non-formal (asrama/pesantren), peserta didik selain memperoleh pendidikan agama yang merupakan materi pokoknya, ia juga memperoleh pendidikan lain seperti pendidikan keterampilan, kepramukaan, kesehatan dan olahraga, serta pendidikan kesenian. Dengan

⁶Baca Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam* (Cet. I; Surakarta: Fataba Press, 2013).

⁷Halfian Lubis, *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia: Studi tentang Strategi Peningkatann Kualitas Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2008), hlm. 330.

⁸A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 11-12.

isi dan muatan pendidikan seperti ini, maka di dalam pendidikan formal yang berasrama ini telah terhimpun tiga komponen pendidikan, yaitu agama, ilmu, dan seni, yang ketiganya harus terkumpul dalam pribadi orang, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.⁹ Penggabungan komponen agama, ilmu dan seni ini hanya ada dalam lembaga pendidikan asrama berbentuk pesantren. Di sinilah perlunya pengembangan asrama peserta didik berbasis pesantren.

Penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan profesi bagi calon guru, perlu dicanangkan secara berasrama, yang diharapkan dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills* dan *hard skills*), wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan membangun wawasan global. Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, yakni calon guru profesional dan berkepribadian, dibutuhkan penataan dan pengelolaan lingkungan kehidupan dan kepengasuhan asrama yang dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat diintegrasikan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG Prajabatan ini harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai wahana pembentukan akhlak mulia dan penguatan akademik, yang diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan pembentukan kompetensi sosial, profesional, dan pedagogik.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Mengacu pada pasal tersebut, asrama menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menghasilkan guru yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan berasrama bagi PPG Prajabatan menjadi sebuah keniscayaan. Itulah sebabnya pendidikan berasrama digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyelenggaraan PPG Prajabatan. Dengan ini, keberadaan asrama memiliki peran strategis yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal, belajar, dan pergaulan sosial yang membantu membentuk kompetensi kepribadian, sosial, dan kepemimpinan para pesertanya.

Pola asrama diharapkan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan karakter peserta PPG Prajabatan dengan menanamkan nilai-nilai yang luhur di

⁹*Ibid.*, hlm. 13.

antaranya adalah kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Dalam kehidupan berasrama, mahasiswa peserta PPG Prajabatan diberikan pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian untuk saling peduli, memiliki kemandirian, kedisiplinan, kemampuan memimpin, menolong dalam kebaikan dan tidak membedakan status sosial dan ekonomi dalam pergaulan sehari-hari di asrama.

Penyelenggaraan PPG Prajabatan berasrama ini merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran di kampus/sekolah/madrasah dalam membentuk profil calon guru yang kuat pada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan kepemimpinan. Untuk itu penyelenggaraan PPG Prajabatan memerlukan model penyelenggarannya yang diasramakan, sebagai pedoman dan rujukan bagi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Salah satu model pengembangannya adalah pembentukan suasana pendidikan yang dapat memupuk kepribadian calon guru.

Kepribadian calon guru peserta PPG tentu saja dipengaruhi karakter lokalnya. Karakter lokal ini pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh standar nilai sosial budaya setempat. Nilai-nilai sosial budaya sebagai dasar pembentukan karakter peserta PPG semestinya digali pada masyarakat sekitar dan nilai-nilai luhur secara umum dalam berbangsa kebangsaan dan bernegara. Nilai-nilai ini menjadi kompetensi dasar kepribadian peserta PPG dengan berbagai kegiatan dengan cara-cara yang mencerminkan kepribadian yang terkait, sehingga mampu mengkondisikan peserta didik dalam berinteraksi dan berperilaku sosial. Berbagai pedoman dan panduan penyelenggaraan PPG yang telah dibuat belum begitu memberi gambaran secara detail terkait model pengembangan bagi pembentukan kepribadian peserta PPG, yang menjadi salah satu kompetensi yang diharapkan. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru* yang dikeluarkan Kemenristekdikti tahun 2017 misalnya menyebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara PPG adalah memiliki asrama mahasiswa,¹⁰ namun pedoman ini belum mengatur bagaimana model asrama yang diperuntukkan bagi pengembangan kompetensi kepribadian peserta didiknya.

Pengembangan model kompetensi kepribadian bagi calon guru yang melaksanakan pendidikan melalui PPG ini menjadi penting, mengingat menurut penilaian Mohammad Abduhzen, Ketua Litbang Pengurus Besar PGRI, kebijakan

¹⁰Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2017), hlm.

profesionalisme guru seolah dipandang sebagai perubahan penting dalam substansi profesi mengajar. Padahal, kenyataannya tidak, karena berbagai program yang dijalankan tak menyentuh faktor-faktor esoteris kepribadian yang dapat men-*drive* kinerja guru. Kepribadian guru sesungguhnya sangat menentukan performa guru. Tingginya tingkat kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional seorang guru, bila kepribadiannya buruk, maka yang dihasilkan adalah pendidikan tak akan efektif. Ini menyangkut latar belakang, proses pembentukan, dan pengembangan kepribadian guru, baik melalui LPTK ataupun pendidikan profesinya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak LPTK yang tidak berkualitas. Data Kemenristekdikti menyebutkan, sekarang ini terdapat 422 LPTK, yang 10 persennya dikelola oleh PTN, selebihnya LPTK milik swasta. LPTK yang dikelola PTN pun hanya 7 persen yang program studinya terakreditasi A, dan 35 persen lainnya terakreditasi B. Oleh karena itu, tantangan LPTK dan PPG ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir dan membuka cakrawala, sehingga terbentuk (calon) guru berkepribadian baru yang mampu menyelenggarakan pembelajaran dialogis.¹¹ Untuk ini, perlu desain proses pembelajaran, termasuk pemagangan semasa di LPTK dan PPG, sehingga terbentuk penguatan kepribadian bagi calon guru.

Kajian I Ketut Margi dan Nengah Bawa Atmadja yang mengkaji eksistensi program PPG dalam perspektif Darwinisme sosial menyimpulkan bahwa kebijakan program PPG ini secara sepintas tidak memiliki masalah, karena memiliki landasan filosofis, yuridis, historis, dan konseptualnya. Namun, dari perspektif pedagogi kritis, program PPG ini mengandung ideologi tersembunyi di balik kebijakannya, yaitu bahwa PPG Prajabatan ini bukan saja memperluas ruang kompetisi dalam mereproduksi guru, tetapi sekaligus juga mempersempit peluang bagi calon keluaran S-1 kependidikan. Untuk itu, diperlukan strategi adaptasi sosial budaya yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi calon guru. Termasuk juga diperlukan peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, dan pengembangan kurikulum yang *multy entry* dan *multy exit*.¹²

Sementara itu, kajian Ratna Rosita Pangestika dan Fitri Alfarisa tentang strategi pengembangan profesionalitas guru melalui PPG menyimpulkan bahwa pelaksanaannya

¹¹Mohammad Abduhzen, "Kompetensi Kepribadian Guru", *Kompas*, 19 Maret 2018.

¹²I Ketut Margi dan Nengah Bawa Atmadja, "Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Perspektif Darwinisme Sosial" *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 46, No. 1, April 2013, hlm. 87-95.

belum dilakukan secara terintegrasi dengan baik, sehingga diperlukan suatu program khusus bagi profesi guru yang berfungsi untuk meningkatkan berbagai kompetensinya.¹³ Kemudian secara khusus, Setiajid, Martien Herna Susanti, Ngabiyanto yang mengkaji pemodelan pendidikan berasrama bagi peserta PPG melalui pengembangan karakter kebangsaan menyebutkan bahwa model faktual pendidikan berasrama Unnes telah dilakukan dengan mengintegrasikan nilai karakter kebangsaan, namun masih perlu penyempurnaan dalam tata kelolanya, yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan pendampingan.¹⁴

Dari beberapa kajian tentang PPG di atas, kiranya perlu dirancang asrama bagi mahasiswa PPG yang tidak hanya *melulu* bersifat asrama pemondokan, tapi harus ada rekayasa pemodelan yang secara *habitus* dapat mencetak kompetensi kepribadian calon guru. Di Provinsi Jawa Tengah, saat ini terdapat enam PTKIN penyelenggara PPG, baik sebagai induk ataupun mitra, yaitu UIN Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, IAIN Pekalongan, IAIN Kudus, IAIN Salatiga dan IAIN Surakarta. Untuk konteks IAIN Surakarta misalnya, LPTK penyelenggara PPG ini telah memperkuat dirinya dengan penyiapan sarana prasarana, SDM, dan perangkat lainnya. Dilihat sarana gedung, IAIN Surakarta telah memiliki gedung tersendiri yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan PPG berlantai lima, lengkap dengan berbagai fasilitasnya, dan telah diresmikan peruntukannya oleh Menteri Agama pada tahun 2016. Sumber daya dosen IAIN Surakarta pun telah diberdayakan dengan memiliki NIA (Nomor Induk Asesor) yang dikeluarkan secara nasional oleh Kemenristekdikti sebagai pendidik dalam penyiapan calon guru, baik LPTK maupun PPG.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai pertimbangan di atas, yang menjadi kegelisahan akademik adalah bagaimana model pengembangan bagi pembentukan kompetensi kepribadian bagi

¹³Ratna Rosita Pangestika dan Fitri Alfarisa, "Pendidikan Profesi Guru (PPG): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia" dalam Ali Muhson dkk. (eds.), *Prosiding Seminar Nasional: Profesionalisme Pendidik dalam Dinamika Kurikulum Pendidikan di Indonesia pada Era MEA* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 671-683.

¹⁴Setiajid, Martien Herna Susanti, Ngabiyanto, "Model Pendidikan Berasrama dalam Mengembangkan Karakter Kebangsaan Peserta Program PPG SM-3T di Universitas Negeri Semarang", *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017*, Vol. 1 No. 1 2017, hlm. 416-420.

peserta PPG? Permasalahan ini tentu saja memerlukan kajian khusus untuk ditemukan model pengembangannya, yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan PPG PTKIN di Jawa Tengah. Sebagai sebuah riset pengembangan, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG yang diselenggarakan oleh PTKIN saat ini?
2. Desain model pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG seperti apakah yang sesuai bagi PPG PTKIN di Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah tingkat keterpakaian desain model pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG PTKIN di Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah dampak penerapan model pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG PTKIN di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, riset pengembangan ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG yang diselenggarakan oleh PTKIN saat ini.
2. Merancang model pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG yang sesuai bagi PPG PTKIN di Jawa Tengah.
3. Menguji tingkat keterpakaian desain model pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG PTKIN di Jawa Tengah.
4. Menjelaskan dampak penerapan model pembentukan kompetensi kepribadian bagi peserta PPG PTKIN di Jawa Tengah.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, riset pengembangan ini diharapkan memiliki kebermaknaan dan kontribusi ilmiah sebagai berikut:

1. Memberi acuan bagi penyelenggara PPG PTKIN di Jawa Tengah dalam mengembangkan program PPG agar terbina kemampuan guru secara terus menerus.
2. Memberikan informasi kepada LPTK yang berminat menyelenggarakan program PPG tentang kerangka penyelenggaraan kompetensi kepribadian minimal yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan program PPG.

3. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat terutama yang berminat menjadi guru dalam menilai/memilih profesi yang akan diembannya kelak kalau mengikuti PPG.
4. Menyediakan acuan bagi para evaluator program PPG dalam menyusun instrumen asesmen yang sahih dan handal.

E. Tinjauan Pustaka

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang mengatur semua komponen isi dan sikap pembentukan kompetensi guru belum secara operasional mengatur teknis pelaksanaan pembentukan kompetensi guru. Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang dikeluarkan Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengatur penyelenggaraan PPG, namun belum mengatur berbagai bentuk kegiatan pembentukan kompetensi kepribadian calon guru dan kerangka kerjanya yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sekitarnya. Demikian juga Panduan Program PPG Prajabatan SM-3T yang dibuat oleh Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2015 yang mengatur berbagai komponen penyelenggaraan PPG sampai berbagai teknis pelaksanaan pembentukan kompetensi pedagogik, profesionalisme, dan sosial, belum mengatur dan memuat bentuk-bentuk kegiatan pembentukan kepribadiannya.

Sementara itu, beberapa kajian yang menyangkut penyelenggaraan PPG secara literatur belum menunjukkan adanya rekayasa pemodelan bagi pembentukan kompetensi kepribadian peserta PPG melalui asrama dalam penyelenggaraannya. Beberapa kajian terkait di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. I Ketut Margi dan Nengah Bawa Atmadja, "Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Perspektif Darwinisme Sosial" *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 46, No. 1, April 2013, hlm. 87-95.
2. Ratna Rosita Pangestika dan Fitri Alfarisa, "Pendidikan Profesi Guru (PPG): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia" dalam Ali Muhson dkk. (eds.), *Prosiding Seminar Nasional: Profesionalisme Pendidik dalam Dinamika Kurikulum Pendidikan di Indonesia*

pada Era MEA (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 671-683.

3. Setiajid, Martien Herna Susanti, Ngabiyanto, “Model Pendidikan Berasrama dalam Mengembangkan Karakter Kebangsaan Peserta Program PPG SM-3T di Universitas Negeri Semarang”, *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017*, Vol. 1 No. 1 2017, hlm. 416-420.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru ini bersifat holistik, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Terkait kompetensi kepribadian, kepribadian yang harus dimiliki seorang guru sekurang-kurangnya mencakup 13 (tiga belas) kepribadian, yaitu beriman dan bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Agar guru memiliki 13 kompetensi kepribadian di atas, perlu dirancang proses pendidikan profesi yang dapat mewujudkannya. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru menyebutkan bahwa pendidikan guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. Program PPG diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Di dalam PP ini ditetapkan bahwa program PPG memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG. Rumusan capaian pembelajaran lulusan PPG mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat: kompetensi pedagogik;

kompetensi kepribadian; kompetensi profesional; dan kompetensi sosial. Untuk itu, standar isi program PPG harus meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan: kompetensi pedagogik; kompetensi kepribadian; kompetensi profesional; dan kompetensi sosial. Agar standar isi program PPG ini tercapai, diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran PPG, yang di antaranya LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga memiliki: laboratorium pembelajaran mikro; pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi; asrama mahasiswa/sarana lain; dan sekolah laboratorium dan/atau sekolah mitra. Asrama mahasiswa berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik. Dengan demikian, asrama mahasiswa PPG sejatinya merupakan *habitus* untuk membentuk kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian calon guru.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *research and development*, yang menurut Sugiyono merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut, yang penggunaan metode ini masih rendah dalam bidang pendidikan.¹⁵ Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah model asrama mahasiswa PPG berbasis pesantren yang digunakan sebagai *habitus* bagi pembentukan kompetensi kepribadian calon guru.

Dalam pelaksanaannya, riset pengembangan ini dilakukan dengan tiga tahapan penelitian, yaitu:

1. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini, dilakukan studi literatur yang mencoba mengkaji penggunaan asrama PPG yang telah dilaksanakan oleh PPG PTKIN selama ini. Studi lapangan ini meniscayakan munculnya **potensi dan masalah** penelitian terkait model asrama PPG yang sudah dilaksanakan oleh PTKIN. Penggunaan metode kualitatif lapangan sangat diperlukan dalam tahapan ini, yaitu dengan penggunaan teknik dokumentasi dan wawancara FGD dengan para penyelenggara PPG PTKIN, sehingga dihasilkan **model faktualnya**.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 407-408.

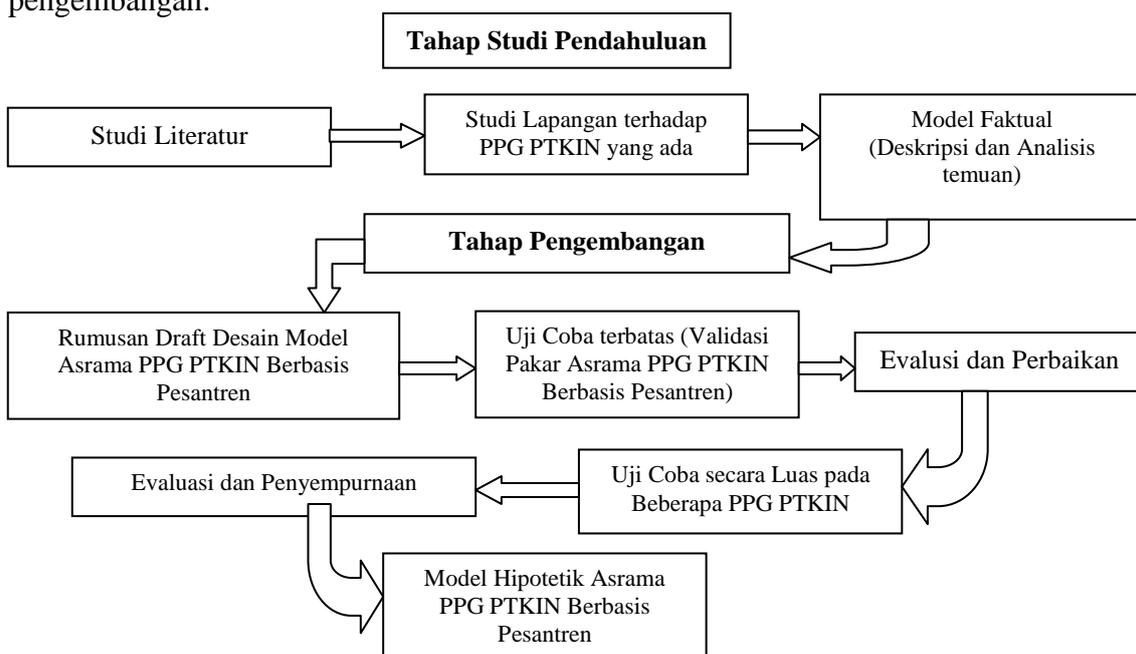
2. Tahap studi pengembangan

Tahap studi pengembangan merupakan langkah untuk melahirkan **model hipotetik**, yaitu pendesainan model asrama mahasiswa PPG PTKIN berbasis pesantren. Untuk melahirkan model ini, terlebih dahulu dirumuskan **draft model**, lalu dilakukan **validasi desain** dengan menghadirkan beberapa pakar asrama mahasiswa PPG PTKIN berbasis pesantren sebagai uji terbatas untuk mengetahui kelemahannya. Hasil dari validasi para pakar kemudian dijadikan dasar untuk **perbaikan desain model**, sehingga selanjutnya dapat diujicobakan secara lebih luas terhadap beberapa PPG PTKIN yang sudah melaksanakannya. Hasil uji coba model secara luas **dievaluasi dan disempurnakan** untuk melahirkan **model hipotetik** asrama PPG PTKIN berbasis pesantren.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahapan untuk melahirkan **model final**. Untuk mencapai ini, perlu dilakukan **tes awal pemakaian, revisi produk dan pembuatan model secara masal**.

Penelitian ini dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan baru sebatas dapat dilakukan hingga tahap pengembangan. Tahap evaluasi dapat dilakukan untuk penelitian tahun berikutnya. Artinya, untuk tahun 2018, penelitian pengembangan ini berhenti sampai tahap pengembangan. Tahap evaluasi dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Berikut dikemukakan gambar desain penelitian hingga tahap pengembangan:



G. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu lima bulan pada 2018, dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Proposal Penelitian		■	■	■																
2.	Tahap Pendahuluan					■	■	■	■												
3.	Tahap Pengembangan									■	■	■	■	■	■						
4.	Analisis Data															■	■	■			
5.	Penulisan Laporan Penelitian																	■	■	■	

H. Personalia

Penelitian ini melibatkan banyak personil, baik di lapangan ataupun ketika FGD. Enam PTKIN di Jawa Tengah, termasuk para pimpinannya juga terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, beberapa pimpinan PTKIN yang sudah menjalankan PPG selama ini juga menjadi bagian informan dalam penelitian ini. Beberapa pakar asrama mahasiswa berbasis pesantren juga terlibat dalam penelitian ini.

I. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Semua pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Dirjen Diktis Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018. Penelitian ini memakan biaya sebesar Rp 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Volume		Satuan Harga	Jumlah
1	Belanja Perjalanan				
	1. Biaya operasional ke Solo [3 ORG x 3 KL]	9	OK	100.000	900.000
	2. Biaya operasional ke Salatiga [3 ORG x 3 KL]	9	OK	150.000	1.350.000
	3. Biaya operasional ke Semarang [3 ORG x 3 KL]	9	OK	250.000	2.250.000
	4. Biaya operasional ke Kudus [3 ORG x 3 KL]	9	OK	350.000	3.150.000
	5. Biaya operasional ke Purwokerto [3 ORG x 3 KL]	9	OK	450.000	4.050.000
	6. Biaya operasional ke Pekalongan [3 ORG x 3 KL]	9	OK	550.000	4.950.000
	7. Uang harian peserta [40 ORG x 1 HR x 3 KEG]	120	OH	100.000	12.000.000
	8. Uang harian pembantu peneliti [6 ORG x 1 HR x 3 KEG]	18	OK	100.000	1.800.000

2	9. Biaya operasional pembantu peneliti [6 ORG x 1 KL]	6	OK	400.000	2.400.000
	10. Transport narasumber utama [1 ORG x 1 KL]	1	OK	500.000	500.000
	11. Transport narasumber pembanding [1 ORG x 1 KL]	1	OK	500.000	500.000
	Belanja Bahan				
	1. Snack kegiatan Pra FGD [44 ORG x 1 KL x 6 KEG]	264	OK	15.000	3.960.000
	2. Snack kegiatan FGD [44 ORG x 1 KL x 6 KEG]	264	OK	15.000	3.960.000
	3. Snack kegiatan validasi hasil [44 ORG x 1 KL x 6 KEG]	264	OK	15.000	3.960.000
	4. Snack kegiatan rapat tim peneliti dengan pembantu peneliti [9 ORG x 1 KL x 1 KEG]	9	OK	15.000	135.000
	5. Makan kegiatan Pra FGD [44 ORG x 1 KL x 6 KEG]	264	OK	30.000	7.920.000
	6. Makan kegiatan FGD [44 ORG x 1 KL x 6 KEG]	264	OK	30.000	7.920.000
	7. Makan kegiatan validasi hasil [44 ORG x 1 KL x 6 KEG]	264	OK	30.000	7.920.000
3	8. Makan kegiatan rapat tim peneliti dengan pembantu peneliti [9 ORG x 1 KL x 1 KEG]	9	OK	30.000	270.000
	9. Perlengkapan peserta [40 ORG x 3 KL x 6 KEG]	720	PKT	50.000	36.000.000
	10. ATK	1	KEG	4.000.000	4.000.000
	11. Foto copy	1	KEG	3.000.000	3.000.000
	12. Penggandaan materi	1	KEG	3.000.000	3.000.000
	13. Toner/tinta	1	KEG	2.500.000	2.500.000
	14. Dokumentasi	1	KEG	4.000.000	4.000.000
	15. Pelaporan	1	KEG	4.055.000	4.055.000
	Belanja Jasa Profesi				
	1. Narasumber utama [1 ORG x 3 JPL x 1 KEG]	3	OJ	800.000	2.400.000
	2. Narasumber pembanding [1 ORG x 3 JPL x 1 KEG]	3	OJ	800.000	2.400.000
	3. Pembantu peneliti [6 ORG x 3 KEG]	18	OK	200.000	3.600.000
	4. Jasa lay out [1 ORG x 1 KEG]	1	OK	150.000	150.000
	5. Jasa penerjemahan hasil penelitian [1 ORG x 1 KEG]	1	OK	15.000.000	15.000.000
	Jumlah				150.000.000

J. Biodata Peneliti

Ketua Tim : Dr. H. Giyoto, M.Hum

Anggota 1 : Dr. Toto Suharto, M.Ag.

Scopus Author ID : <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199231286>

Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=2GV51msAAAAJ&hl=id>

Orcid ID : <http://orcid.org/0000-0001-8351-9067>

Anggota 2 : Ika Sulistyarini, M.Pd.

K. Daftar Pustaka

- Abduhzen, Mohammad. "Kompetensi Kepribadian Guru", *Kompas*, 19 Maret 2018.
- Ali, A. Mukti. *Metode Memahami Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Asrohah, Hanun. *Pelebagaan Pesantren: Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*. Cet. I; Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015*. Jakarta: Dirjen Pendis, 2016.
- I Ketut Margi dan Nengah Bawa Atmadja, "Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Perspektif Darwinisme Sosial" *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 46, No. 1, April 2013, hlm. 87-95.
- Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2017.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Lubis, Halfian. *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia: Studi tentang Strategi Peningkatann Kualitas Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2008.
- Madjid, Nurcholish. "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Cet. I; Jakarta: P3M, 1985.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
- Pangestika, Ratna Rosita dan Alfarisa, Fitri. "Pendidikan Profesi Guru (PPG): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia" dalam Ali Muhson dkk. (eds.), *Prosiding Seminar Nasional: Profesionalisme Pendidik dalam Dinamika Kurikulum Pendidikan di Indonesia pada Era MEA* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 671-683.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Setiajid, Martien Herna Susanti, Ngabiyanto. "Model Pendidikan Berasrama dalam Mengembangkan Karakter Kebangsaan Peserta Program PPG SM-3T di Universitas Negeri Semarang", *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017*, Vol. 1 No. 1 2017, hlm. 416-420.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto, Toto. "Bayn ma'had Tebuireng wa Madrasat Manba' al-'Ulūm: Dirāsah tārikhiyyah 'an nash'at mafhūm 'Al-Madrasah fi al-Ma'had'", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 149-173.

Suharto, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*. Cet. I; Surakarta: Fataba Press, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.